

2023
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PANGKALPINANG**

Jalan Jend. Sudirman – Selindung Baru Pangkalpinang (Telp. 0717) 322111

LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pangan dan Pertanian merupakan kewajiban Dinas Pangan dan Pertanian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, Dinas Pangan dan Pertanian merumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Dinas Pangan dan Pertanian dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapainya ditetapkan 2 tujuan dan 2 sasaran, sebagai berikut:

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dengan suatu lembaga agar penganggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
2. Penganggaran belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan;

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah merencanakan kegiatan dengan berpatokan kepada hasil dari kinerja yang akan dicapai dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya, potensi, dan daya dukung lingkungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas taufiq, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023. LAKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang disusun berdasarkan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja. Laporan ini memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, serta realisasi indikator dari sasaran-sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Tahun anggaran 2023 merupakan tahun keempat dari Renstra OPD Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami berharap laporan ini sebagai penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Januari 2024

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Pangkalpinang

SAMRI, SP, M.Si.

Pembina TK. 1/ IV.b

NIP. 197205041993031006

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	24
1.5 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian.....	26
2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1. Pengukuran Kinerja.....	32
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	32
3.3 Analisis Keuangan.....	34
3.4 Pendapatan.....	36
3.5 Belanja.....	36
BAB IV PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1.3 Asset Tanah.....	10
Tabel 1.4 Asset Gedung dan Bangunan.....	10
Tabel 1.5 Asset Peralatan dan Mesin.....	10
Tabel 1.6 Buku dan Lain-lain.....	17
Tabel 1.7 APBD Tahun 2023.....	17
Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	27
Tabel 3.3 Target Anggaran Pendapan dan Realisasi.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto-foto Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian 2023

Lampiran 2. Laporan Pertanggungjawaban penerimaan (SPJ Pendapatan)
Tahun 2023

Lampiran 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diterima (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan di dalam Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap OPD diharuskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 01) dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Peternakan serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretariat Daerah Kota.

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berisikan mengenai sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang sehingga dapat diketahui secara luas dan dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit pelaksana di lingkungan. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja *output* dan atau *outcome* dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 berdasarkan siklus anggaran yang terjadi yaitu 1 tahun, yang secara lengkap menyajikan laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan;
- m. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
- n. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang;
- o. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 14) tanggal 12 September 2019;
- p. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 35) tanggal 13 September 2019.

.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kota pengkalpinang nomor 18 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan oraganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unsur penunjang perangkat daerah kota pangkalpinang (Lembaran daerah kota pangkalpinang tahun 2021 nomor 1), Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tipe B adalah unsur pelaksana teknis daerah bidang pangan dan pertanian yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui sekretaris daerah kota. Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan Pertanian;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi kota pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah kota pangkalpinang bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pangan dan Pertanian menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang ketahanan pangan dan pertanian di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.3.2 Struktur organisasi

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 18 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unsur penunjang perangkat daerah kota pangkalpinang (Lembaran daerah kota pangkalpinang tahun 2021 nomor 1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas (Eselon II);
2. Sekretaris (Eselon III a), dengan satu Kasubbag dan satu Subkoordinator Kasubbag:
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV a);
 - b. Subkoordinator Kasubbag PEP dan Keuangan (Perencana Ahli Muda) (Eselon IV a).
3. Bidang Ketahanan Pangan (Eselon III b) dengan tiga Subkoordinator, yaitu:
 - a. Subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda) (Eselon IV a);
 - b. Subkoordinator Keamanan Pangan (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pangan Muda)n (Eselon IVa); dan
 - c. Subkoordinator Konsumsi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda) (Eselon IVa).
4. Bidang Peternakan (Eselon III b), dengan satu Subkoordinator, yaitu:
 - a. Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda) (Eselon IV a);
 - b. Sub koordinator kesehatan hewan (medik Veteriner Muda) (Eselon IV a); dan
 - c. Subkoordinator kesehatan masyarakat veteriner pengolahan dan pemasaran (medik Veteriner Muda) (Eselon IV a).
5. Bidang Tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura (Eselon III b), dengan tiga Subkoordinator, yaitu:
 - a. Subkoordinator Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran (Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Muda) (Eselon IV a);

- b. Subkoordinator Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda) (Eselon IV a); dan
 - c. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan (Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda) (Eselon IV a).
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari:
- a. UPT. Rumah Potong Hewan (RPH) (Eselon IV a); dengan satu Kasubbag Tata Usaha, yaitu:
 - Kasubbag Tata Usaha (Eselon IV b);
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPT. Pusat Kesehatan Hewan (Eselon IV a) dengan satu Kasubbag Tata Usaha, yaitu:
 - Kasubbag Tata Usaha (Eselon IV b);
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPT. Perbibitan (Eselon IV a); dengan satu Kasubbag Tata Usaha, yaitu:
 - Kasubbag Tata Usaha (Eselon IV b);
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
- a. Dokter Hewan;
 - b. Penyuluh Pertanian;
 - c. Paramedis Veteriner.
 - d. Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya
 - e. Fungsional Penyuluh Pertanian
 - f. Pengawas Bibit Tanaman
 - g. Fungsional Medik Veteriner
 - h. Bendahara Penerimaan
 - i. Bendahara Pengeluaran
 - j. Medik Veteriner Ahli Pertama

Struktur Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

**Struktur Organisasi
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang
Tahun 2022**

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 MARET 2020

KEPALA DINAS

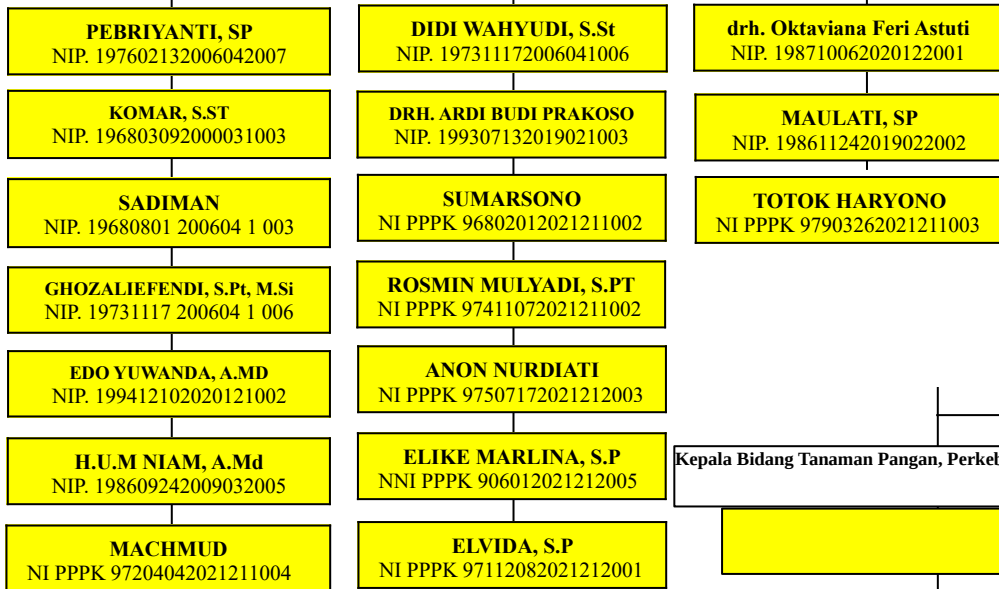
SAMRI, SP, M.Si
NIP 197205041993031006

SEKRETARIS

Irma Mutiah Sari, SS., M.Si
NIP 197109072005012008

NIP. 19641012 198709 1 002

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL



SUBBAG. Umum dan Kepegawaian

ISLARINA, S.E
NIP. 198111172010012004

Subkoordinator Keuangan dan PEP (Fungsional Perencana Muda)

NUR USNI, SE
NIP. 197909302009032007

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Holtikultura

Subkoordinator Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran (Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Muda)

ERI HARYONO, SP
NIP. 198207292006041004

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

ZUNARIA, S.PT
NIP. 198110172010011012

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi (Fungsional Pengawas Mutu Pakan Muda)

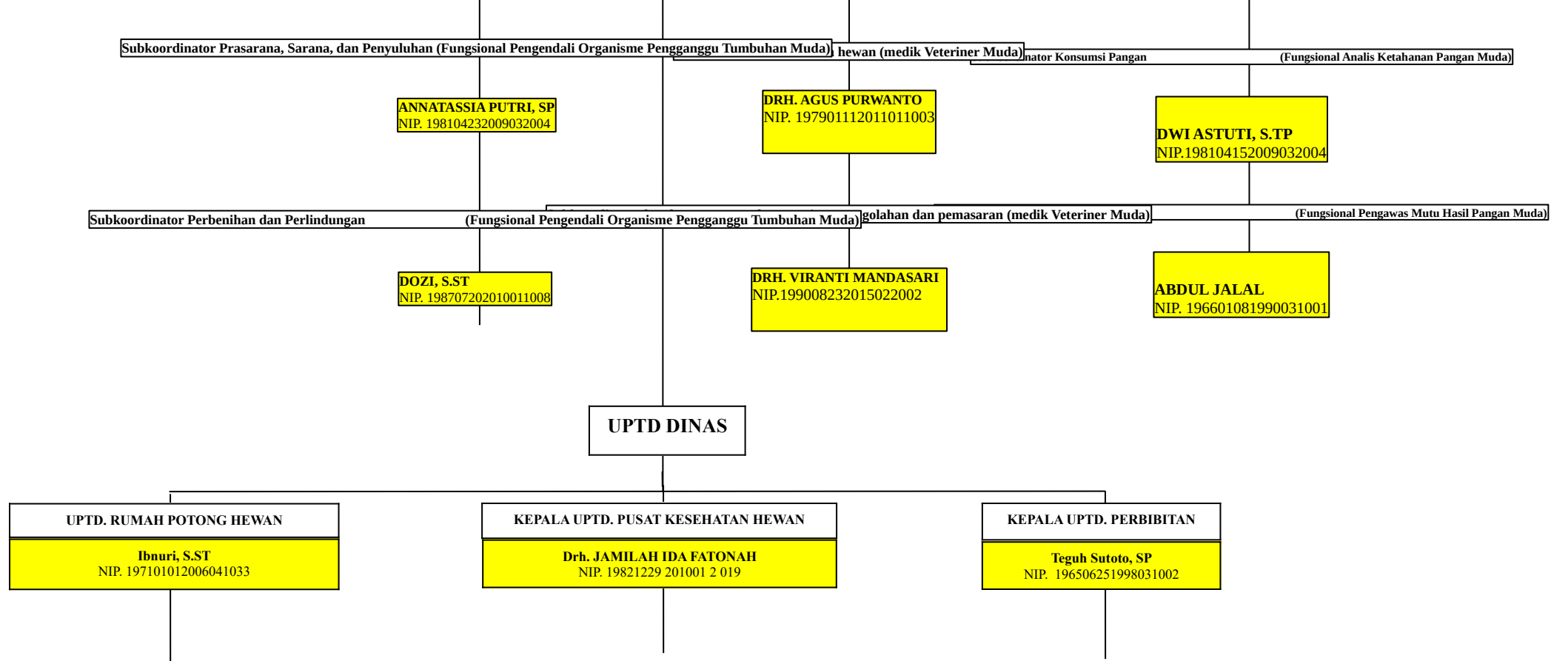
SRI MURNI, S.ST
NIP. 196805301999032001

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

YIYI ZILAILA DWITRI, SP
NIP.19761023 200604 2 002

Subkoordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Muda)

UNGGUL ULUNG P, SP
NIP. 198103142015021002



1.3.3 Sumber

KASUBAG TU RPH

KASUBAG TUPUSKESWAN

1.3.3.1 Sumber

Herry Maraganta, S.Pt
NIP. 198009142010011013

Dinas pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan perangkat dinas atau personil-personil yang memenuhi persyaratan dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian. Pegawai dilingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2023 sebanyak 47 orang ASN, terdiri 26 Laki-laki dan 21 perempuan dan 50 Non ASN, terdiri 29 laki-laki dan 21 perempuan. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan pada S1 dan SMA. Sejumlah 38 orang untuk S1 dan 19 orang untuk SMA Sederajat, sedangkan berpendidikan paling rendah SD sejumlah 6 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan di Dinas Pangan dan Pertanian 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S.2	2	1	0	0	3
2	S.1	10	16	5	7	38
3	D.IV	3	1	1	1	6
4	D.III	3	2	1	3	9
5	D.II	0	0	0	1	1
6	SLTA	1	0	2	0	3
7	SMK	0	0	4	3	7
8	SMA	4	1	8	6	19
9	PAKET C	0	0	1	0	1
10	SLTP	0	0	1	0	1
11	SMP	2	0	1	0	3
12	SD	1	0	5	0	6
Total		26	21	29	21	97

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III. yaitu sejumlah 26 orang dan pegawai PNS paling sedikit dari golongan I yaitu sejumlah 1 orang pada tahun 2023 seperti terlihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	8
3	Golongan III	26
4	Golongan IV	5
5	Golongan V	4
6	Golongan IX	3

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Asset Tanah

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan	Kondisi
Tanah				
1	Pengembangan (Land Clearing dan Penimbunan)	1	M2	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	M2	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	M2	Baik
4	Tanah Peternakan Lainnya	1	M2	Baik

Tabel 1. 4 Asset Gedung dan Bangunan

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
2	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	1	Baik
3	Bangunan Gudang Lain-lain	1	Baik
4	Bangunan Lain-lain	1	Baik
5	Sumur Bor	1	Baik

6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	Baik
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	6	Baik
8	Bangunan Teralis Besi	13	Baik
9	Bangunan Gapura	1	Baik
10	Bangunan kanopi	1	Baik
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
12	Bangunan Gudang Lain-lain	2	Baik
13	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2	Baik
14	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	1	Baik
15	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	1	Baik
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain	3	Kurang Baik
17	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	1	Kurang Baik
18	Bangunan Kandang Hewan Lain-lain	1	Baik
19	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	1	Baik
20	Bangunan Lain-lain	2	Baik
21	Konstruksi Pagar	8	Baik
22	Bangunan Conblock	1	Baik
23	Kamar Kecil/Toilet	1	Baik
24	Bangunan Parkir	3	Baik
25	Bangunan Sarana Penampungan Air Limbah	1	Baik
26	Perkerasan Jalan	2	Baik
27	Bangunan Observasi Tanaman	1	Baik
28	Bangunan Observasi Tanaman	1	Kurang Baik
29	Bangunan Produksi Pupuk kompos	1	Baik
30	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	2	Kurang Baik
31	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	1	Baik
32	Rumah jaga	1	Baik
33	Jalan Desa	1	Baik
34	sumur bor	3	Baik
35	instalasi listrik	2	Baik
36	Drainase Primer	1	Baik
37	Penambahan daya listrik	1	Baik
38	instalasi	1	Baik
39	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	1	Baik
40	Instalasi Jaringan telepon	1	Baik
41	jaringan lampu jalan	1	Baik
42	jaringan	5	Baik
43	Tangki Air	2	Baik

Tabel 1. 5 Aset Peralatan dan mesin

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
Peralatan dan mesin			
1	mobil dinas	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	Baik
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Baik
4	mobil dinas	1	Baik
5	Sepeda Motor	19	Baik
6	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Baik
7	Timbangan	1	Baik
8	Bajak Muara	1	Kurang Baik
9	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2	Kurang Baik
10	kuali besar	1	Kurang Baik
11	kuali besar	1	Baik
12	Alat Pertanian dan peternakan	1	Kurang Baik
13	Alat-alat Peternakan Lain-lain	32	Baik
14	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	6	Baik
15	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	4	Baik
16	Alat Pencacah Hujan	1	Baik
17	Alat Processing Lain-lain	1	Baik
18	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	5	Baik
19	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Baik
20	Alat Panen Lain-lain	1	Baik
21	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	4	Baik
22	Alat Kantor rumah tangga lainnya	2	Baik
23	Mesin Air	2	Baik
24	Generator Set	2	Baik
25	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
26	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
28	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
29	Mesin Ketik Listrik Portable	1	Baik
30	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
31	Mesin Calculator	4	Baik
32	Mesin Calculator	2	Kurang Baik
33	Lemari Besi	8	Baik
34	Rak Besi/Metal	4	Baik
35	Filling Besi/Metal	36	Baik
36	Peti Uang	1	Baik
37	Lemari Kaca	10	Baik
38	Lemari Hardboard	1	Baik
39	Lemari Loker	5	Baik

40	Papan Visuil	1	Baik
41	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
42	Papan Pengumuman	1	Baik
43	White Board	13	Baik
44	Genset	3	Baik
45	Mesin Pompa Air	5	Baik
46	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Baik
47	Vertikal Blend	22	Baik
48	mesin penghancur kertas	3	Baik
49	Hand Tractor	2	Baik
50	Meja Rapat	12	Baik
51	Kursi Rapat	44	Baik
52	Kursi Tamu	6	Baik
53	Kursi Putar	2	Kurang Baik
54	Kursi Putar	20	Baik
55	Kursi Biasa	6	Baik
56	Kursi Lipat	35	Baik
57	Meja Biro	26	Baik
58	Meja Biro	3	Kurang Baik
59	Sofa	1	Baik
60	Kursi Plastik	4	Kurang Baik
61	Kursi Kerja	73	Baik
62	Gordyn	1	Baik
63	Dinding/Sekat Besi	1	Baik
64	Meja Boxing Service	2	Baik
65	Sentri Fuge	1	Baik
66	Jam Elektronik	2	Baik
67	Mesin Potong Rumput	1	Baik
68	Gerobak Sorong Sampah	2	Baik
69	Lemari Es	1	Baik
70	AC Unit	12	Baik
71	AC Split	1	Baik
72	Kipas Angin	20	Baik
73	Exhause Fan	1	Baik
74	AC	1	Baik
75	Mesin Pompa Air	2	Baik
76	Kompor Gas	1	Baik
77	Tabung Gas	1	Baik
78	Alat Dapur Lain-lain	1	Baik
79	Dispenser	3	Baik
80	Whipped Cream Maker	1	Rusak Berat

81	Microwave	8	Rusak Berat
82	Microwave	7	Baik
83	Choper	1	Rusak Berat
84	Choper	1	Baik
85	Salamender	1	Rusak Berat
86	Slicer	1	Rusak Berat
87	Blender	60	Baik
88	presto	60	Baik
89	Tangki Solar	1	Baik
90	Coffe Table	1	Baik
91	Gelas Minum	1	Baik
92	kain panel	60	Baik
93	Televisi	3	Baik
94	Sound System	1	Baik
95	Tustel	1	Baik
96	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
97	Tiang Bendera	1	Baik
98	Tangga Alumunium	1	Baik
99	Dispenser	1	Baik
100	Handy Cam	2	Baik
101	Mesin Air	3	Baik
102	Mesin Potong Rumput	1	Baik
103	AC	4	Baik
104	PIPA BAJA / BESI	30	Baik
105	Bak Pasir	28	Baik
106	Mesin Air	2	Baik
107	Tangki Air	1	Baik
108	Kembang Hidup	2	Baik
109	Wallpaper	2	Baik
110	Altimeter	1	Baik
111	Alat Pemadam Portable	1	Baik
112	Tangga	1	Baik
113	tabung pemadam kebakaran	2	Baik
114	Personal Komputer Lain-lain	11	Baik
115	P.C Unit/ Komputer PC	15	Baik
116	Mesin Air	1	Baik
117	Lap Top	11	Baik
118	Lap Top	1	Kurang Baik
119	Note Book	2	Rusak Berat
120	Note Book	5	Baik
121	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	4	Baik

122	Printer	21	Baik
123	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	4	Baik
124	Monitor	7	Baik
125	Printer	4	Baik
126	UPS	13	Baik
127	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
128	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Rusak Berat
129	Meja Kerja	47	Baik
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
132	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
133	Lemari Kaca	1	Baik
134	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Baik
135	Lemari Es	1	Baik
136	Proyektor + Attachment	3	Baik
137	Telephone Hybird	7	Baik
138	Layar Proyektor	1	Baik
139	MIXER	1	Baik
140	Amplifier	1	Baik
141	speaker	4	Baik
142	tape recorder	1	Baik
143	Camera Electronic	1	Baik
144	Video Processor	1	Baik
145	Camera Film	1	Baik
146	Sound System	2	Baik
147	Facsimile	2	Baik
148	TOA	2	Baik
149	GPS	4	Baik
150	Microphone/Wireless Mic	1	Baik
151	Stand Microphone	4	Baik
152	Stetoscope	1	Baik
153	Anatomische Pinset	2	Baik
154	Chirurgical Pinset	2	Baik
155	Arteri Klem	2	Baik
156	Gunting Bengkok	2	Baik
157	Needle Holder	1	Baik
158	Trocart	1	Baik
159	Auto Clape	1	Baik
160	Lampu Operasi	1	Baik
161	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan	1	Baik
162	Alat Kedokteran Hewan	1	Baik

163	Nudle Aeraplex	1	Baik
164	Scapel Handle	1	Baik
165	Scapel Blade	1	Baik
166	Jarum Kulit	1	Baik
167	Jarum Obat	1	Baik
168	Kandang Transportasi	4	Baik
169	Skining Cradle	5	Baik
170	Cradle Stainless Steel	5	Baik
171	Beel Spliter	1	Baik
172	Pisau Set	8	Baik
173	Hand Hook	5	Baik
174	Meja Stainless Steel	5	Baik
175	Alat Sterilisasi Pisau	1	Baik
176	Offal Hanger	5	Baik
177	High Pressure Cleaner	1	Baik
178	Katrol Mekanik Set	1	Baik
179	Timbangan Gantung Digital	1	Baik
180	S Hook	3	Baik
181	Gerobak Dorong	3	Baik
182	Timbangan Gantung Kuningan	2	Baik
183	ph meter daging	1	Baik
184	Alat kedokteran lainnya	8	Baik
185	Otoscope	1	Baik
186	Meja Operasi	1	Baik
187	Clipper	1	Baik
188	Cutter	2	Baik
189	ALat Kesehatan Kerja Lain-lain	4	Baik
190	Timbangan	1	Baik
No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
	Buku dan lain-lain		
1	Buku Umum Lain-lain	4	Baik
2	Ekonomi	8	Baik
3	Hukum	14	Baik
4	Buku perpustakaan lainnya	2	Baik
5	Sapi	1	Baik
6	Tanaman Holtikultura Lain-lain	1	Baik

Tabel 1. 6 Aset Buku dan lain-lain

3.4. Gambaran Penganggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang telah didukung dengan berbagai sumber anggaran. Salah satu sumber dana tahun 2023 adalah berasal dari APBD Kota Pangkalpinang dengan rincian seperti Tabel 1.7 dan DAK Non Fisik seperti Tabel 1.8 di bawah ini :

Tabel 1. 7 APBD Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.509.598.451
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.509.598.451
Administrasi Umum Perangkat Daerah	655.029.178
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.499.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.938.250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.628.160
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.915.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.048.768
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511.445.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	511.445.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.105.204
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.620.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.401.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	620.083.704
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.712.699
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.511.696
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.201.003
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.000.000
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	500.000
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	500.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	532.980.000
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	500.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	532.480.000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.000.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.000.000

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	457.228.000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	457.228.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	54.403.650
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	36.403.650
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	9.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	9.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	47.396.992
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	47.396.992
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	181.663.480
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	5.000.000
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	176.663.480
Pengembangan Prasarana Pertanian	4.114.000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	4.114.000
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	45.000.000
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	45.000.000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	4.425.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4.425.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	153.621.334
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	153.621.334
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	345.301.068
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	88.100.000
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	257.201.068
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.435.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.435.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	305.351.172
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	182.523.172
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	122.828.000
Total Pagu	9.876.810.228

Tabel 1. 8 DAK Non Fisik Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.625.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.625.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	7.700.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	7.700.000
Total Pagu	158.325.000

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2023; sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang di masa yang akan datang;
- b. Untuk mendorong penerapan LAKIP di jajaran Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dengan demikian LAKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini pada prinsipnya mempunyai fungsi utama sebagai alat komunikasi tertulis kepada *stakeholder* yang menggambarkan seberapa jauh kinerja yang telah ditargetkan dapat dicapai untuk terwujudnya Visi dan Misi sekaligus sebagai alat evaluasi bagi perbaikan kinerja yang akan datang.

.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN** Memuat uraian yang melatar belakangi pentingnya penyusunan LAKIP dan memuat uraian sekilas tentang tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aset yang dimiliki. Dalam bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari penyusunan LAKIP.
- BAB.II PERENCANAAN KINERJA** Dalam bab ini diuraikan secara lengkap tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan rencana kinerja dinas pangan dan pertanian kota pangkalpinang
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** Berisi tentang uraian pengukuran kinerja sekaligus mengkorelasikannya dengan pengukuran program dan kegiatan, bab ini juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan realisasi kinerja di bawah atau di atas target beserta penjelasan sebab keberhasilan dan kegagalan serta membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.
- BAB IV PENUTUP** Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja dinas pangan dan pertanian kota pangkalpinang tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian kota pangkalpinang Tahun 2018-2023 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan-perbaikan sistematika dan kebijakan di bidang pangan dan pertanian.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian di Kota Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2018-2023 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian dalam pencapaian visi dan misi Walikota serta tujuan organisasi. Visi Pemerintahan kota Pangkalpinang berdasarkan RPJMD kota pangkalpinang

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup;

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka Dinas Pangan dan Pertanian kota Pangkalpinang mengacu dan mendukung misi ke-1 (Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan)

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kota Pangkalpinang yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan

Adapun Tujuan dari Dinas Pangan dan Pertanian, yaitu:

1. Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan;
2. Meningkatkan Nilai Tukar Petani.

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Pangan periode tahun 2018 – 2023 adalah sebanyak 2 Sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan Pangan Utama;
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditi Pertanian dan Peternakan (Ton) (Tanaman pangan, hortikultura, susu, telur, dan daging).

2.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian

2.2.1 Strategi Dinas Pangan dan Pertanian

Strategi-strategi sesuai misi yang telah ditetapkan, berikut strategi pencapaian sarannya adalah:

1. Meningkatkan pemantauan terhadap jumlah pasokan dan harga pangan agar tetap terjangkau, serta mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
2. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan;
3. Peningkatan sarana dan Prasarana pertanian, Pelatihan Bimbingan Teknis kepada Petani;
4. Peningkatan sarana, Prasarana peternakan dan Kesehatan hewan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada Peternak.

2.2.2 Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakannya adalah:

1. Menjamin Pasokan Pangan dengan prioritas pada pemantauan pasokan harga pangan, pengembangan cadangan pangan, pendataan informasi pasokan pangan pokok;
2. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan Mengembangkan teknologi pengolahan pangan,

- terutama pangan lokal non beras dan non terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;
3. Mempercepat peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, memperbanyak pelatihan bimbingan teknis Kepada petani;
 4. Mempercepat peningkatan Sarana dan Prasarana Peternak, memperbanyak pelatihan bimbingan teknis Kepada peternak.

2.2.3 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang telah disusun Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dalam renstra SKPD. Untuk mencapai keberhasilan indikator kinerja di Tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang didukung oleh 9 Program, 21 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang terdiri dari:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iv. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

- a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - i. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - ii. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- b) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - i. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
 - ii. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

- a) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - i. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- b) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - i. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

- a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - i. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - i. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- c) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- d) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - ii. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- a) Pengembangan Prasarana Pertanian
 - i. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- b) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - i. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

7. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kot
 - i. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- c) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - i. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - ii. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

8. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - i. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

9. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

- a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - ii. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan bahwa sasaran yang akan dicapai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Utama;
- b. Meningkatnya Produktivitas Komoditi Pertanian dan Peternakan (ton) (tanaman pangan, hortikultura, susu, telur, dan daging).

Sasaran tersebut di atas terkait erat dengan visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang Selanjutnya dari sasaran di atas, telah dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan. Sebagai konsekuensinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang telah menjabarkan dalam rencana anggaran tahun 2023. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis dari berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3.1. Pengukuran Kinerja

Sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data - data kinerja

yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di OPD, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, diperoleh hasil kinerja Dinas Pangan dan Pertanian kota Pangkalpinang dengan rincian seperti pada tabel 3.1 yang terlampir:

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pangan dan Pertanian kota Pangkalpinang terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran). Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Sasaran 1 : Menigkatnya produktivitas komoditas pertanian dan peternakan (ton) (tanaman pangan, hortikultura, susu, telur, dan daging. untuk mengukur sasaran ini diaunakan 1 indikator kineria utama:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%
1	Nilai tukar petani	169,71	0	0

Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi target 2023 adalah 169,71 dan teralisasi sebesar 0 atau 0%. Usaha pencapaian indikator skor Nilai Tukar Petani didukung oleh 5 (lima) program; 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 3) Program Penyuluhan Pertanian. 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. dan oleh 12 (Duabelas) kegiatan; 1) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. 2) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota. 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. 4) Pengembangan Prasarana Pertanian. 5) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota. 6) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. 7) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 8) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. 9) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. 10) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. 11) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. 12) Pengembangan Prasarana Pertanian

Sasaran 2 : Mengukur sasaran ketersediaan Pangan Utama digunakan 1 indikator kinerja utama:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%
1	Skor Pola Pangan Harapan	90	91,9	102

Target Skor Ketersediaan pangan utama 2023 adalah 90 Skor dan teralisasi sebesar 91,9 Skor atau 102%. Usaha pencapaian indikator Ketersediaan pangan utama didukung oleh 3 (tiga) program; 1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan. 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan dan didukung oleh 5(lima) kegiatan; 1)Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. 3) Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. 4) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. 5) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Analisis Keuangan

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang diuraikan sebagai berikut. Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.10.035.135.228 (Sepuluh *milyar tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*).

Tabel 3. 1 Anggaran Belanja Tahun 2023

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang(-)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.864.161.040	5.509.598.451	-354.562.589

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.503.000	6.499.000	4.996.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	424.938.250	424.938.250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.388.060	31.628.160	17.240.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.665.000	18.915.000	8.250.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.526.768	173.048.768	41.522.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000	511.445.000	-88.555.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.720.000	108.620.000	-35.100.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.986.500	26.401.500	7.415.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628.660.400	620.083.704	-8.576.696
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.181.696	192.511.696	48.330.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		102.201.003	102.201.003
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	500.000	500.000	0
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	500.000	500.000	0
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10.000.000		-10.000.000
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	500.000	500.000	0
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10.000.000	532.480.000	522.480.000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.000.000	2.000.000	0
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	457.228.000	452.228.000
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	36.403.650	34.403.650
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000	18.000.000	9.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	9.000.000	9.000.000	0
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	47.396.992	47.396.992	0
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4.000.000	4.000.000	0
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	5.000.000	5.000.000	0
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	176.663.480	176.663.480	0
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	4.114.000	4.114.000	0

Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	45.000.000	45.000.000	0
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	155.000.000	4.425.000	-150.575.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	199.991.934	304.246.334	104.254.400
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16.450.000	88.100.000	71.650.000
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	248.676.068	257.201.068	8.525.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.435.000	3.435.000	0
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	190.223.172	190.223.172	0
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	43.740.000	122.828.000	79.088.000
TOTAL	8.745.983.110	10.035.135.228	1.289.152.118

3.4 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang untuk pendapatan per Desember mencapai 81 % atau sebesar Rp. 338,217,050 (*Tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah*) dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 420,000,000.00 (*Empat ratus dua puluh juta rupiah*) Pendapatan ini berasal dari retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Retribusi Rumah Potong Hewan.

Tabel 3. 2 Target Anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	170.000.000	173.362.050	102%
4.1.2.20.01	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.000.000	164.855.000	66%
JUMLAH		420.000.000	338.217.050	81%

3.5 Belanja

Realisasi capaian target kinerja keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang untuk belanja daerah mencapai 92,47% atau sebesar Rp. 9,445,556,062.00 (*Sembilan milyar empat ratus empat puluh*

lima juta lima ratus lima puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10,214,535,228.00 (Sepuluh milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah). Rincian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 5,078,910,950.00 (Lima milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 91,35% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 5,559,598,451.00 (Lima milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Tabel 3. 3

Rincian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun anggaran 2023

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	(%)	Fisik (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.559.598.451	5.078.910.950	91,35	99,96
BELANJA OPERASI	5.559.598.451	5.078.910.950	91,35	91,35
BELANJA PEGAWAI	5.548.036.547	5.068.539.242	91,36	91,36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.157.629.544	2.955.563.587	93,60	93,60
BELANJA GAJI POKOK ASN	2.302.921.656	2.236.727.100	97,13	97,13
Belanja Gaji Pokok PNS	2.041.351.252	1.981.900.500	97,09	97,09
Belanja Gaji Pokok PPPK	261.570.404	254.826.600	97,42	97,42
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	219.101.613	212.924.236	97,18	97,18
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	205.196.793	199.475.332	97,21	97,21
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.904.820	13.448.904	96,72	96,72
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	309.917.463	191.340.000	61,74	61,74
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	198.689.793	191.340.000	96,30	96,30
Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	111.227.670	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	151.752.480	147.840.000	97,42	97,42
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	111.227.670	108.360.000	97,42	97,42
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	40.524.810	39.480.000	97,42	97,42
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.463.625	29.080.000	89,58	89,58
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.463.625	29.080.000	98,70	98,70
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.000.000	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	138.784.312	135.135.720	97,37	97,37
Belanja Tunjangan Beras PNS	124.214.349	120.941.400	97,37	97,37
Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.569.963	14.194.320	97,42	97,42
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.651.004	2.479.777	93,54	93,54
Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	2.651.004	2.479.777	93,54	93,54
Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.391	36.754	98,30	98,30
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.195	32.651	98,36	98,36
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.196	4.194	99,95	99,95
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.302.157.003	2.046.375.655	88,89	88,89
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.302.157.003	2.046.375.655	88,89	88,89
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	2.044.419.211	1.815.883.200	88,82	88,82

PNS				
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	257.737.792	233.157.600	90,46	90,46
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.250.000	54.700.000	61,98	61,98
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	26.000.000	8.500.000	32,69	32,69
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	26.000.000	8.500.000	32,69	32,69
Belanja Honorarium	62.250.000	58.100.000	93,33	93,33
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.000.000	46.200.000	92,40	92,40
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.000.000	46.200.000	92,40	92,40
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.250.000	11.900.000	97,14	97,14
Honorarium PPTK	12.250.000	11.900.000	97,14	97,14
Belanja Barang dan Jasa	11.561.904	10.371.708	89,71	89,71
Belanja Jasa	11.561.904	10.371.708	89,71	89,71
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.561.904	10.371.708	89,71	89,71
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.138.352	4.609.404	89,71	89,71
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.423.552	5.762.304	89,71	89,71

Untuk Merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama menggunakan dana dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Rincian realisasi Sub Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Plafond Dana (Rp)			Realisasi		
	APBD INDUK	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan (ABT)	Keuangan (Rp)	(%)	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.557.792.464	7.557.792.464	7.775.890.532	7.229.541.965	92,97	99,96
Administrasi keuangan perangkat daerah	5.864.161.040	5.864.161.040	5.559.598.451	5.078.910.950	91,35	99,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.864.161.040	5.864.161.040	5.559.598.451	5.078.910.950	91,35	99,96
BELANJA OPERASI	5.864.161.040	5.864.161.040	5.559.598.451	5.078.910.950	91,35	91,35
BELANJA PEGAWAI	5.852.599.136	5.852.599.136	5.548.036.547	5.068.539.242	91,36	91,36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.347.765.716	3.347.765.716	3.157.629.544	2.955.563.587	93,60	93,60
BELANJA GAJI POKOK ASN	2.519.073.875	2.519.073.875	2.302.921.656	2.236.727.100	97,13	97,13
Belanja Gaji Pokok PNS	2.261.474.958	2.261.474.958	2.041.351.252	1.981.900.500	97,09	97,09
Belanja Gaji Pokok PPPK	257.598.917	257.598.917	261.570.404	254.826.600	97,42	97,42
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	244.740.061	244.740.061	219.101.613	212.924.236	97,18	97,18
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	230.849.846	230.849.846	205.196.793	199.475.332	97,21	97,21
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.890.215	13.890.215	13.904.820	13.448.904	96,72	96,72
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	211.158.250	211.158.250	309.917.463	191.340.000	61,74	61,74
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	-	-	198.689.793	191.340.000	96,30	96,30
Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	211.158.250	211.158.250	111.227.670	-	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	171.786.384	171.786.384	151.752.480	147.840.000	97,42	97,42
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	126.598.000	126.598.000	111.227.670	108.360.000	97,42	97,42
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	45.188.384	45.188.384	40.524.810	39.480.000	97,42	97,42

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.858.500	44.858.500	32.463.625	29.080.000	89,58	89,58
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.858.500	41.858.500	29.463.625	29.080.000	98,70	98,70
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	152.666.197	152.666.197	138.784.312	135.135.720	97,37	97,37
Belanja Tunjangan Beras PNS	138.217.191	138.217.191	124.214.349	120.941.400	97,37	97,37
Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.449.006	14.449.006	14.569.963	14.194.320	97,42	97,42
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.443.125	3.443.125	2.651.004	2.479.777	93,54	93,54
Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	3.443.125	3.443.125	2.651.004	2.479.777	93,54	93,54
Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.324	39.324	37.391	36.754	98,30	98,30
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.163	33.163	33.195	32.651	98,36	98,36
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.161	6.161	4.196	4.194	99,95	99,95
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.443.913.420	2.443.913.420	2.302.157.003	2.046.375.655	88,89	88,89
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.443.913.420	2.443.913.420	2.302.157.003	2.046.375.655	88,89	88,89
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.187.855.624	2.187.855.624	2.044.419.211	1.815.883.200	88,82	88,82
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	256.057.796	256.057.796	257.737.792	233.157.600	90,46	90,46
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.920.000	60.920.000	88.250.000	54.700.000	61,98	61,98
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	26.000.000	26.000.000	26.000.000	8.500.000	32,69	32,69
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	26.000.000	26.000.000	26.000.000	8.500.000	32,69	32,69
Belanja Honorarium	34.920.000	34.920.000	62.250.000	58.100.000	93,33	93,33
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.920.000	34.920.000	50.000.000	46.200.000	92,40	92,40
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.920.000	34.920.000	50.000.000	46.200.000	92,40	92,40
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	12.250.000	11.900.000	97,14	97,14

Honorarium PPTK	-	-	12.250.000	11.900.000	97,14	97,14
Belanja Barang dan Jasa	11.561.904	11.561.904	11.561.904	10.371.708	89,71	89,71
Belanja Jasa	11.561.904	11.561.904	11.561.904	10.371.708	89,71	89,71
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.561.904	11.561.904	11.561.904	10.371.708	89,71	89,71
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.138.352	5.138.352	5.138.352	4.609.404	89,71	89,71
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.423.552	6.423.552	6.423.552	5.762.304	89,71	89,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.366.900	791.366.900	755.105.204	715.648.875	94,77	94,77
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.720.000	143.720.000	108.620.000	101.656.567	93,59	93,59
BELANJA OPERASI	143.720.000	143.720.000	108.620.000	101.656.567	93,59	93,59
BELANJA BARANG DAN JASA	143.720.000	143.720.000	108.620.000	101.656.567	93,59	93,59
Belanja Jasa	143.720.000	143.720.000	108.620.000	101.656.567	93,59	93,59
Belanja Jasa Kantor	143.720.000	143.720.000	108.620.000	101.656.567	93,59	93,59
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	143.720.000	143.720.000	108.620.000	101.656.567	93,59	93,59
Belanja Tagihan Telepon	720.000	720.000	720.000	696.000	96,67	96,67
Belanja Tagihan air	36.000.000	36.000.000	12.000.000	6.286.000	52,38	52,38
Belanja Tagihan Listrik	83.000.000	83.000.000	93.900.000	93.110.847	99,16	99,16
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000	24.000.000	2.000.000	1.563.720	78,19	78,19
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.986.500	18.986.500	26.401.500	21.405.000	81,07	81,07
BELANJA OPERASI	18.986.500	18.986.500	26.401.500	21.405.000	81,07	81,07
Belanja Pegawai	18.986.500	18.986.500	26.401.500	21.405.000	81,07	81,07
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	350.000	-	0,00	0,00
Belanja Honorarium	-	-	350.000	-	0,00	0,00

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	350.000	-	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	18.986.500	18.986.500	26.051.500	21.405.000	82,16	82,16
Belanja Pemeliharaan	18.986.500	18.986.500	26.051.500	21.405.000	82,16	82,16
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.986.500	18.986.500	26.051.500	21.405.000	82,16	82,16
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingi	9.830.000	9.830.000	10.630.000	10.520.000	98,97	98,97
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	5.000.000	4.700.000	94,00	94,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.156.500	9.156.500	10.421.500	6.185.000	59,35	59,35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628.660.400	628.660.400	620.083.704	592.587.308	95,57	95,57
BELANJA OPERASI	628.660.400	628.660.400	620.083.704	592.587.308	95,57	95,57
Belanja Pegawai	628.660.400	628.660.400	620.083.704	592.587.308	95,57	95,57
Belanja Barang dan Jasa	628.660.400	628.660.400	620.083.704	592.587.308	95,57	95,57
Belanja Barang	27.868.000	27.868.000	31.963.000	30.888.300	96,64	96,64
Belanja Bahan Pakai Habis	27.868.000	27.868.000	31.963.000	30.888.300	96,64	96,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	1.700.000	1.698.300	99,90	99,90
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.868.000	27.868.000	28.863.000	27.895.000	96,65	96,65
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	1.400.000	1.295.000	92,50	92,50
Belanja Jasa	600.792.400	600.792.400	578.620.704	555.249.008	95,96	95,96
Belanja Jasa Kantor	600.792.400	600.792.400	578.620.704	555.249.008	95,96	95,96
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	2.100.000	-	0,00	0,00
Belanja Jasa Teknis Pertanian dan Pangan	580.520.704	580.520.704	556.249.008	536.666.620	96,48	96,48
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.271.696	20.271.696	20.271.696	18.582.388	91,67	91,67
BELANJA MODAL	0	0	9.500.000	6.450.000	67,89	67,89

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	9.500.000	6.450.000	67,89	67,89
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	9.500.000	6.450.000	67,89	67,89
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0	9.500.000	6.450.000	67,89	67,89
Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	9.500.000	6.450.000	67,89	67,89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.082.828	158.082.828	655.029.178	641.802.241	97,98	97,98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.503.000	1.503.000	6.499.000	5.878.422	90,45	90,45
BELANJA OPERASI	1.503.000	1.503.000	6.499.000	5.878.422	90,45	90,45
Belanja Barang dan Jasa	1.503.000	1.503.000	6.499.000	5.878.422	90,45	90,45
Belanja Barang	1.503.000	1.503.000	6.499.000	5.878.422	90,45	90,45
Belanja Bahan Pakai Habis	1.503.000	1.503.000	6.499.000	5.878.422	90,45	90,45
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.503.000	1.503.000	6.499.000	5.878.422	90,45	90,45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	424.938.250	415.667.000	97,82	97,82
BELANJA OPERASI	-	-	102.417.000	102.417.000	100,00	100,00
Belanja Pegawai	-	-	765.000	765.000	100,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	765.000	765.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium	-	-	765.000	765.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	765.000	765.000	100,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	0	0	101.652.000	101.652.000	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	0	0	101.652.000	101.652.000	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	101.652.000	101.652.000	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	101.652.000	101.652.000	100,00	100,00
BELANJA MODAL	0	0	322.521.250	313.250.000	97,13	97,13

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	307.521.250	298.400.000	97,03	97,03
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	187.256.250	183.850.000	98,18	98,18
Belanja Modal Alat Kantor	0	0	75.000.000	75.000.000	100,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	75.000.000	75.000.000	100,00	100,00
Belanja partisi dan perlengkapannya	0	0	31.000.000	30.600.000	98,71	98,71
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0	31.000.000	30.600.000	98,71	98,71
Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	22.000.000	21.600.000	98,18	98,18
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	81.256.250	78.250.000	96,30	96,30
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	-	-	16.500.000	16.200.000	98,18	98,18
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	-	-	10.000.000	9.500.000	95,00	95,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-	54.756.250	52.550.000	95,97	95,97
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	31.265.000	26.600.000	85,08	85,08
Belanja Modal Alat Studio	0	0	31.265.000	26.600.000	85,08	85,08
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	18.000.000	14.250.000	79,17	79,17
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	-	-	13.265.000	12.350.000	93,10	93,10
Belanja Modal Komputer	0	0	89.000.000	87.950.000	98,82	98,82
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	85.000.000	84.200.000	99,06	99,06
Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	4.000.000	3.750.000	93,75	93,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	15.000.000	14.850.000	99,00	99,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	0	15.000.000	14.850.000	99,00	99,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0	0	15.000.000	14.850.000	99,00	99,00

Belanja Modal Audio Visual	-	-	15.000.000	14.850.000	99,00	99,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.388.060	14.388.060	31.628.160	28.493.800	90,09	90,09
BELANJA OPERASI	14.388.060	14.388.060	31.628.160	28.493.800	90,09	90,09
Belanja Barang dan Jasa	14.388.060	14.388.060	31.628.160	28.493.800	90,09	90,09
Belanja Barang	14.388.060	14.388.060	31.628.160	28.493.800	90,09	90,09
Belanja Bahan Pakai Habis	14.388.060	14.388.060	31.628.160	28.493.800	90,09	90,09
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.220.000	1.220.000	1.220.000	850.000	69,67	69,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.713.660	10.713.660	26.028.660	23.313.800	89,57	89,57
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.600.000	1.600.000	1.240.000	1.240.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	300.000	300.000	600.000	600.000	100,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	554.400	554.400	2.539.500	2.490.000	98,05	98,05
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.665.000	10.665.000	18.915.000	18.830.000	99,55	99,55
BELANJA OPERASI	10.665.000	10.665.000	18.915.000	18.830.000	99,55	99,55
Belanja Barang dan Jasa	10.665.000	10.665.000	18.915.000	18.830.000	99,55	99,55
Belanja Barang	10.665.000	10.665.000	18.915.000	18.830.000	99,55	99,55
Belanja Bahan Pakai Habis	10.665.000	10.665.000	18.915.000	18.830.000	99,55	99,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.665.000	10.665.000	18.915.000	18.830.000	99,55	99,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.526.768	131.526.768	173.048.768	172.933.019	99,93	99,93
BELANJA OPERASI	131.526.768	131.526.768	173.048.768	172.933.019	99,93	99,93
Belanja Barang dan Jasa	131.526.768	131.526.768	173.048.768	172.933.019	99,93	99,93
Belana Perjalanan Dinas	131.526.768	131.526.768	173.048.768	172.933.019	99,93	99,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.526.768	131.526.768	173.048.768	172.933.019	99,93	99,93

Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.526.768	131.526.768	173.048.768	172.933.019	99,93	99,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.181.696	144.181.696	294.712.699	294.504.899	99,93	99,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.181.696	144.181.696	192.511.696	192.303.896	99,89	99,89
BELANJA OPERASI	144.181.696	144.181.696	192.511.696	192.303.896	99,89	99,89
BELANJA BARANG DAN JASA	144.181.696	144.181.696	192.511.696	192.303.896	99,89	99,89
Belanja Jasa	21.931.696	21.931.696	21.931.696	21.931.696	100,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	21.931.696	21.931.696	21.931.696	21.931.696	100,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	21.931.696	21.931.696	21.931.696	21.931.696	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	122.250.000	122.250.000	170.580.000	170.372.200	99,88	99,88
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122.250.000	122.250.000	170.580.000	170.372.200	99,88	99,88
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.250.000	38.250.000	53.250.000	53.099.500	99,72	99,72
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	84.000.000	84.000.000	117.330.000	117.272.700	99,95	99,95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	102.201.003	102.201.003	100,00	100,00
BELANJA OPERASI	-	-	102.201.003	102.201.003	100,00	100,00
Belanja Pegawai	-	-	549.000	549.000	100,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	549.000	549.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium	-	-	549.000	549.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	549.000	549.000	100,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	-	-	44.532.838	44.532.838	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	-	-	44.532.838	44.532.838	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	44.532.838	44.532.838	100,00	100,00
Pengembalian Belanja (STS)				(44.532.838)	0,00	0,00

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	44.532.838	89.065.676	200,00	200,00
BELANJA MODAL	-	-	57.119.165	57.119.165	100,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	57.119.165	57.119.165	100,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	57.119.165	57.119.165	100,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	57.119.165	57.119.165	100,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	57.119.165	57.119.165	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000	600.000.000	511.445.000	498.675.000	97,50	97,50
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000	600.000.000	511.445.000	498.675.000	97,50	97,50
BELANJA OPERASI	600.000.000	600.000.000	511.445.000	498.675.000	97,50	97,50
Belanja Pegawai	-	-	1.445.000	1.445.000	100,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	1.445.000	1.445.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium	-	-	1.445.000	1.445.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	1.445.000	1.445.000	100,00	100,00
BELANJA MODAL	600.000.000	600.000.000	510.000.000	497.230.000	97,50	97,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000	600.000.000	510.000.000	497.230.000	97,50	97,50
Belanja Modal Alat Angkutan	600.000.000	600.000.000	510.000.000	497.230.000	97,50	97,50
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	196.000.000	196.000.000	170.000.000	163.000.000	95,88	95,88
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	404.000.000	404.000.000	340.000.000	334.230.000	98,30	98,30
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	75.500.000	64.250.000	651.380.000	521.242.055	80,02	80,07
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	11.000.000	11.000.000	1.000.000	950.000	95,00	95,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
BELANJA OPERASI	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00

Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
Belanja Barang	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
Belanja Barang Pakai Habis	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.000	225.000	225.000	225.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	275.000	275.000	275.000	250.000	90,91	90,91
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
BELANJA OPERASI	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
Belanja Barang	500.000	500.000	500.000	475.000	95,00	95,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.000	225.000	225.000	225.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	275.000	275.000	275.000	250.000	90,91	90,91
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Barang	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	275.000	275.000	0	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	0	0	-	0,00	0,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.725.000	9.725.000	0	-	0,00	0,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	64.500.000	53.250.000	650.380.000	520.292.055	80,00	80,04

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	500.000	500.000	500.000	470.000	94,00	94,00
BELANJA OPERASI	500.000	500.000	500.000	470.000	94,00	94,00
BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	500.000	470.000	94,00	94,00
Belanja Barang	500.000	500.000	500.000	470.000	94,00	94,00
Belanja Barang Pakai Habis	500.000	500.000	500.000	470.000	94,00	94,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.000	225.000	225.000	220.000	97,78	97,78
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	275.000	275.000	275.000	250.000	90,91	90,91
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	64.000.000	52.750.000	649.880.000	519.822.055	79,99	80,03
BELANJA OPERASI	64.000.000	52.750.000	649.880.000	519.822.055	79,99	80,03
Belanja Pegawai	-	-	918.000	765.000	83,33	83,33
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	918.000	765.000	83,33	83,33
Belanja Honorarium	-	-	918.000	765.000	83,33	83,33
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	918.000	765.000	83,33	83,33
Belanja Barang dan Jasa	52.750.000	52.750.000	231.562.000	219.057.055	94,60	94,73
Belanja Barang	52.750.000	52.750.000	152.812.000	149.891.000	98,09	98,28
Belanja Barang Pakai Habis	52.750.000	52.750.000	152.812.000	149.891.000	98,09	98,28
Belanja Bahan-Bahan Baku	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.430.000	96,30	96,30
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	14.130.000	13.005.000	92,04	92,04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	12.537.000	11.996.000	95,68	98,04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	4.970.000	4.945.000	99,50	99,50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	3.000.000	2.000.000	66,67	66,67
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	9.725.000	9.725.000	100,00	100,00

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	700.000	700.000	100,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.150.000	48.150.000	48.150.000	48.090.000	99,88	99,88
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	55.000.000	55.000.000	100,00	100,00
Belanja Jasa	11.250.000	0	78.750.000	69.166.055	87,83	87,83
Belanja Jasa Kantor	0	0	19.300.000	9.800.000	50,78	50,78
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	17.300.000	7.950.000	45,95	45,95
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	-	1.000.000	850.000	85,00	85,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.250.000	0	20.800.000	20.800.000	100,00	100,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.250.000	-	17.500.000	17.500.000	100,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	31.250.000	31.166.055	99,73	99,73
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	0	31.250.000	31.166.055	99,73	99,73
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	20.000.000	19.916.055	99,58	99,58
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	11.250.000	11.250.000	100,00	100,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	7.400.000	7.400.000	100,00	100,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	7.400.000	7.400.000	100,00	100,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	7.400.000	7.400.000	100,00	100
Belanja Bantuan Sosial	0	0	300.000.000	300.000.000	100,00	100
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	0	300.000.000	300.000.000	100,00	100
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	0	300.000.000	300.000.000	100,00	100
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	300.000.000	300.000.000	100,00	100

Program Penanganan kerawanan pangan	5.400.000	5.400.000	459.228.000	430.991.249	93,85	93,85
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
Belanja Barang	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.400.000	3.400.000	457.228.000	428.991.249	93,82	93,82
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.400.000	3.400.000	457.228.000	428.991.249	93,82	93,82
BELANJA OPERASI	3.400.000	3.400.000	457.228.000	428.991.249	93,82	93,82
Belanja Pegawai	-	-	765.000	-	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	765.000	-	0,00	0,00
Belanja Honorarium	-	-	765.000	-	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	765.000	-	0,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000	3.400.000	456.463.000	428.991.249	93,98	93,98
Belanja Barang	2.500.000	2.500.000	416.863.000	391.521.000	93,92	93,92
Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000	2.500.000	416.863.000	391.521.000	93,92	93,92
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.590.000	1.328.000	83,52	83,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			5.000.000	1.520.000	30,40	30,40
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			360.048.000	338.448.000	94,00	94,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor Lainnya			425.000	425.000	100,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000	1.500.000	49.800.000	49.800.000	100,00	100,00
Belanja Jasa	-	-	17.500.000	15.400.000	88,00	88,00
Belanja Jasa Kantor	-	-	17.500.000	15.400.000	88,00	88,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	17.500.000	15.400.000	88,00	88,00
Belanja Jasa	900.000	900.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	900.000	900.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	900.000	900.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	22.100.000	22.070.249	99,87	99,87
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	22.100.000	22.070.249	99,87	99,87
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	20.000.000	19.970.249	99,85	99,85
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	11.000.000	11.000.000	66.403.650	53.441.596	80,48	80,48
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	11.000.000	11.000.000	66.403.650	53.441.596	80,48	80,48
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	48.403.650	35.953.596	74,28	74,28
BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	48.403.650	35.953.596	74,28	74,28
Belanja Pegawai	-	-	459.000	459.000	100,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	459.000	459.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium	-	-	459.000	459.000	100,00	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	459.000	459.000	100,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	35.944.650	35.494.596	98,75	98,75
Belanja Barang	2.000.000	2.000.000	35.944.650	35.494.596	98,75	98,75

Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000	2.000.000	23.944.650	23.518.000	98,22	98,22
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	900.000	900.000	20.300.000	20.170.000	99,36	99,36
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	1.054.650	863.000	81,83	81,83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Tulis Kantor	-	-	150.000	150.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	950.000	950.000	1.990.000	1.915.000	96,23	96,23
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000	150.000	450.000	420.000	93,33	93,33
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	12.000.000	11.976.596	99,80	99,80
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	12.000.000	11.976.596	99,80	99,80
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	12.000.000	11.976.596	99,80	99,80
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000	9.000.000	18.000.000	17.488.000	97,16	97,16
BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	18.000.000	17.488.000	97,16	97,16
Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	9.000.000	18.000.000	17.488.000	97,16	97,16
Belanja Barang	9.000.000	9.000.000	18.000.000	17.488.000	97,16	97,16
Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000	9.000.000	18.000.000	17.488.000	97,16	97,16
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000	9.000.000	18.000.000	17.488.000	97,16	97,16
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	242.060.472	242.060.472	242.060.472	232.540.578	96,07	96,07
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.430.000	93,67	93,67
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.430.000	93,67	93,67
BELANJA OPERASI	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.430.000	93,67	93,67
BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.430.000	93,67	93,67
Belanja Barang	1.300.000	1.300.000	1.300.000	730.000	56,15	56,15
Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000	1.300.000	1.300.000	730.000	56,15	56,15

Belanja Bahan-Bahan Kimia	420.000	420.000	420.000	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000	150.000	150.000	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
Belanja makanan dan minuman Rapat	630.000	630.000	630.000	630.000	100,00	100,00
Belanja Jasa	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	100,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	100,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	100,00	100,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	47.396.992	47.396.992	47.396.992	46.293.392	97,67	97,67
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	47.396.992	47.396.992	47.396.992	46.293.392	97,67	97,67
BELANJA OPERASI	47.396.992	47.396.992	47.396.992	46.293.392	97,67	97,67
BELANJA BARANG DAN JASA	46.646.992	46.646.992	46.646.992	45.543.392	97,63	97,63
Belanja Barang	1.103.600	1.103.600	1.103.600	-	0,00	0,00
Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.600	1.103.600	1.103.600	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600	3.600	3.600	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-	0,00	0,00
Belanja Jasa	45.543.392	45.543.392	45.543.392	45.543.392	100,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	45.543.392	45.543.392	45.543.392	45.543.392	100,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.543.392	45.543.392	45.543.392	45.543.392	100,00	100,00
BELANJA MODAL	750.000	750.000	750.000	750.000	100,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.000	750.000	750.000	750.000	100,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	750.000	750.000	750.000	750.000	100,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor	750.000	750.000	750.000	750.000	100,00	100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	750.000	750.000	750.000	750.000	100,00	100,00
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.857.500	96,44	96,44
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.857.500	96,44	96,44
BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.857.500	96,44	96,44
BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.857.500	96,44	96,44
Belanja Barang	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.507.500	94,62	94,62
Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.507.500	94,62	94,62
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	100.000	100.000	-	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.507.500	98,33	98,33
Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00	100,00
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	181.663.480	181.663.480	181.663.480	173.959.686	95,76	95,76
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.737.000	94,74	94,74
BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.737.000	94,74	94,74
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.737.000	94,74	94,74
Belanja Barang	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.537.000	90,61	90,61
Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.537.000	90,61	90,61
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	220.000	220.000	220.000	-	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.537.000	98,33	98,33
Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,00	100,00
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	176.663.480	176.663.480	176.663.480	169.222.686	95,79	95,79
BELANJA OPERASI	176.663.480	176.663.480	176.663.480	169.222.686	95,79	95,79
BELANJA BARANG DAN JASA	175.663.480	175.663.480	171.663.480	165.522.686	96,42	96,42
Belanja Barang	57.465.000	57.465.000	53.465.000	50.604.000	94,65	94,65
Belanja Bahan Pakai Habis	57.465.000	57.465.000	53.465.000	50.604.000	94,65	94,65
Belanja Bahan-Bahan Kimia	29.250.000	29.250.000	29.250.000	28.750.000	98,29	98,29
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.450.000	4.450.000	4.450.000	3.160.000	71,01	71,01
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.365.000	5.365.000	1.365.000	1.094.000	80,15	80,15
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.400.000	6.400.000	6.400.000	5.600.000	87,50	87,50
Belanja Jasa	113.858.480	113.858.480	113.858.480	112.043.686	98,41	98,41
Belanja Jasa Kantor	113.858.480	113.858.480	113.858.480	112.043.686	98,41	98,41
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	113.858.480	113.858.480	113.858.480	112.043.686	98,41	98,41
Belanja Pemeliharaan	4.340.000	4.340.000	4.340.000	2.875.000	66,24	66,24
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.340.000	4.340.000	4.340.000	2.875.000	66,24	66,24
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.340.000	4.340.000	4.340.000	2.875.000	66,24	66,24
BELANJA MODAL	1.000.000	1.000.000	5.000.000	3.700.000	74,00	74,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.800.000	70,00	70,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	1.000.000	4.000.000	2.800.000	70,00	70,00
Belanja Modal Alat Pembersih			4.000.000	2.800.000	70,00	70,00

Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	90,00	90,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.114.000	49.114.000	49.114.000	48.947.000	99,66	99,66
Pengembangan Prasarana Pertanian	4.114.000	4.114.000	4.114.000	3.947.000	95,94	95,94
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	4.114.000	4.114.000	4.114.000	3.947.000	95,94	95,94
BELANJA OPERASI	4.114.000	4.114.000	4.114.000	3.947.000	95,94	95,94
Belanja Barang dan Jasa	4.114.000	4.114.000	4.114.000	3.947.000	95,94	95,94
Belanja Barang	614.000	614.000	614.000	447.000	72,80	72,80
Belanja Bahan Pakai Habis	614.000	614.000	614.000	447.000	72,80	72,80
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	164.000	164.000	164.000	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	450.000	450.000	450.000	447.000	99,33	99,33
Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
BELANJA OPERASI	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	614.618.002	614.618.002	653.972.402	634.529.847	97,03	97,03
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000	155.000.000	4.425.000	4.423.000	99,95	99,95
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	155.000.000	155.000.000	4.425.000	4.423.000	99,95	99,95
BELANJA OPERASI	155.000.000	155.000.000	4.425.000	4.423.000	99,95	99,95
BELANJA BARANG DAN JASA	155.000.000	155.000.000	4.425.000	4.423.000	99,95	99,95
Belanja Bahan Pakai Habis	155.000.000	155.000.000	4.425.000	4.423.000	99,95	99,95
Belanja Bahan-Bahan Kimia	300.000	300.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.575.000	150.575.000	225.000	223.000	99,11	99,11
Belanja Obat-Obatan-Obat	3.405.000	3.405.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	720.000	720.000	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.991.934	199.991.934	304.246.334	295.779.659	97,22	97,22
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	199.991.934	199.991.934	304.246.334	295.779.659	97,22	97,22
BELANJA OPERASI	199.991.934	199.991.934	304.246.334	295.779.659	97,22	97,22
BELANJA BARANG DAN JASA	199.991.934	199.991.934	304.246.334	295.779.659	97,22	97,22
Belanja Barang	81.655.150	81.655.150	112.034.550	108.382.875	96,74	96,74
Belanja Bahan Pakai Habis	81.655.150	81.655.150	112.034.550	108.382.875	96,74	96,74
Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	600.000	588.000	98,00	98,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.677.550	32.677.550	18.175.600	17.996.500	99,01	99,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.014.000	4.014.000	10.843.700	10.808.300	99,67	99,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	4.999.750	4.368.075	87,37	87,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.140.000	2.140.000	3.245.000	2.934.000	90,42	90,42
Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	34.690.000	33.423.000	96,35	96,35

Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	42.823.600	42.823.600	39.480.500	38.265.000	96,92	96,92
Belanja Jasa	108.336.784	108.336.784	115.661.784	111.256.784	96,19	96,19
Belanja Jasa Kantor	108.336.784	108.336.784	115.661.784	111.256.784	96,19	96,19
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	81.815.088	81.815.088	81.815.088	81.815.088	100,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	-				
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.271.696	21.271.696	21.271.696	21.271.696	100,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.250.000	5.250.000	7.500.000	5.250.000	70,00	70,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	2.400.000	2.200.000	91,67	91,67
Belanja Paket/Pengiriman	-	-	2.675.000	720.000	26,92	26,92
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	76.550.000	76.140.000	99,46	99,46
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0	0	76.550.000	76.140.000	99,46	99,46
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	2.050.000	2.050.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	74.500.000	74.090.000	99,45	99,45
BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	259.626.068	259.626.068	345.301.068	334.327.188	96,82	96,82
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16.450.000	16.450.000	88.100.000	80.176.000	91,01	91,01
BELANJA OPERASI	16.450.000	16.450.000	88.100.000	80.176.000	91,01	91,01

BELANJA BARANG DAN JASA	16.450.000	16.450.000	88.100.000	80.176.000	91,01	91,01
Belanja Barang	13.650.000	13.650.000	75.300.000	70.873.500	94,12	94,12
Belanja Bahan Pakai Habis	13.650.000	13.650.000	75.300.000	70.873.500	94,12	94,12
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	497.000	497.000	497.000	490.000	98,59	98,59
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.000	23.000	2.595.000	2.425.500	93,47	93,47
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.200.000	9.200.000	10.900.000	10.360.000	95,05	95,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	270.000	270.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	350.000	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	15.608.000	15.608.000	100,00	100,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	35.300.000	32.000.000	90,65	90,65
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	5.850.000	5.850.000	100,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.740.000	96,67	96,67
Belanja Jasa	-	-	10.000.000	6.502.500	65,03	65,03
Belanja Jasa Kantor	-	-	8.700.000	5.852.500	67,27	67,27
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	8.700.000	5.852.500	67,27	67,27
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	1.300.000	650.000	50,00	50,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	1.300.000	650.000	50,00	50,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	243.176.068	243.176.068	257.201.068	254.151.188	98,81	98,81
BELANJA OPERASI	243.176.068	243.176.068	257.201.068	242.400.188	94,25	94,25
Belanja Pegawai	-	-	1.115.000	765.000	68,61	68,61
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	1.115.000	765.000	68,61	68,61
Belanja Honorarium	-	-	1.115.000	765.000	68,61	68,61
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	350.000	-	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	765.000	765.000	100,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA	243.176.068	243.176.068	256.086.068	241.635.188	94,36	94,36
Belanja Barang	41.002.500	41.002.500	40.982.500	39.461.620	96,29	96,29
Belanja Bahan Pakai Habis	41.002.500	41.002.500	40.982.500	39.461.620	96,29	96,29
Belanja Bahan-Bahan Kimia	400.000,00	400.000,00	400.000,00	386.280	96,57	96,57
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.872.800,00	1.872.800,00	1.872.800,00	1.783.880	95,25	95,25
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.687.500,00	4.687.500,00	4.687.500,00	3.361.080	71,70	71,70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.969.700,00	8.969.700,00	8.969.700,00	8.894.430	99,16	99,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	2.047.950	99,29	99,29
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	510.000,00	510.000,00	490.000,00	488.000	99,59	99,59
Belanja Jasa	182.173.568	182.173.568	192.173.568	192.173.568	100,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	182.173.568	182.173.568	182.173.568	182.173.568	100,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	91.086.784,00	91.086.784,00	91.086.784,00	91.086.784	100,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	66.815.088,00	66.815.088,00	66.815.088,00	66.815.088	100,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000	100,00	100,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696	100,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.000.000	10.000.000	-	-	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
BELANJA MODAL	5.500.000	5.500.000	12.930.000	11.751.000	90,88	90,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000	5.500.000	5.500.000	4.551.000	82,75	82,75
Belanja Modal Alat Besar	5.500.000	5.500.000	5.500.000	4.551.000	82,75	82,75
Belanja Modal Alat Bantu	5.500.000	5.500.000	5.500.000	4.551.000	82,75	82,75
Belanja Modal Pompa	5.500.000	5.500.000	5.500.000	4.551.000	82,75	82,75
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	7.430.000	7.200.000	96,90	96,90
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.435.000	3.435.000	3.435.000	2.455.000	71,47	71,47
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.435.000	3.435.000	3.435.000	2.455.000	71,47	71,47
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.435.000	3.435.000	3.435.000	2.455.000	71,47	71,47
BELANJA OPERASI	3.435.000	3.435.000	3.435.000	2.455.000	71,47	71,47
Belanja Barang dan Jasa	3.435.000	3.435.000	3.435.000	2.455.000	71,47	71,47
Belanja Barang	3.435.000	3.435.000	3.435.000	2.455.000	71,47	71,47
Belanja Bahan Pakai Habis	3.435.000	3.435.000	3.435.000	2.455.000	71,47	71,47
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.665.000	2.665.000	2.665.000	1.855.000	69,61	69,61

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	130.000	130.000	130.000	-	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.000	40.000	40.000	-	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	600.000	600.000	600.000	600.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	233.963.172	233.963.172	313.051.172	291.866.772	93,23	93,23
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	233.963.172	233.963.172	313.051.172	291.866.772	93,23	93,23
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	190.223.172	190.223.172	190.223.172	182.120.672	95,74	95,74
BELANJA OPERASI	190.223.172	190.223.172	190.223.172	182.120.672	95,74	95,74
BELANJA BARANG DAN JASA	190.223.172	190.223.172	190.223.172	182.120.672	95,74	95,74
Belanja Barang	26.321.300	26.321.300	19.521.300	12.718.800	65,15	65,15
Belanja Bahan Pakai Habis	26.321.300	26.321.300	19.521.300	12.718.800	65,15	65,15
Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.295.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	5.200.000	82,61	82,61
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.846.800,00	1.846.800,00	1.846.800,00	-	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			776.000,00	743.800	95,85	95,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	179.500,00	179.500,00	343.500,00	150.000	43,67	43,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	1.495.000	37,33	37,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.500.000,00	11.500.000,00	1.510.000,00	1.510.000	100,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.125.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00	2.250.000	66,67	66,67
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000	100,00	100,00
Belanja Jasa	163.901.872	163.901.872	166.901.872	166.901.872	100,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	163.901.872	163.901.872	166.901.872	166.901.872	100,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	163.901.872	163.901.872	163.901.872	163.901.872	100,00	100,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	3.000.000,00	3.000.000	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	3.800.000	2.500.000	65,79	65,79
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	3.800.000	2.500.000	65,79	65,79
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	3.800.000	2.500.000	65,79	65,79
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	43.740.000	43.740.000	122.828.000	109.746.100	89,35	89,35
BELANJA OPERASI	43.740.000	43.740.000	122.828.000	109.746.100	250,91	250,91
Belanja Pegawai	-	-	459.000	459.000	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	459.000	459.000	0,00	0,00
Belanja Honorarium	-	-	459.000	459.000	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	459.000	459.000	0,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA	43.740.000	43.740.000	99.740.000	94.887.100	95,13	95,13
Belanja Barang	43.740.000	43.740.000	99.740.000	94.887.100	95,13	95,13
Belanja Bahan Pakai Habis	43.740.000	43.740.000	99.740.000	94.887.100	95,13	95,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	-	-	2.570.000	1.882.100	73,23	73,23
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	-	-	430.000	430.000	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	-	-	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	43.740.000	43.740.000	93.740.000	89.575.000	95,56	95,56
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	22.629.000	14.400.000	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	22.629.000	14.400.000	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	12.629.000	12.300.000	97,39	97,39
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	10.000.000	2.100.000	21,00	21,00
	8.792.883.110	8.781.633.110	10.214.535.228	9.445.556.062	92,47	99,96

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2023 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban, yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang di tahun-tahun berikutnya.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan bidang Ketahanan pangan, pertanian, dan peternakan selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas/ kegiatan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

4.2 Saran

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas kedepan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, diharapkan kepada semua unit organisasi di

lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian, dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu-isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya sehingga dapat terumuskan dengan baik di dalam Rencana Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1.Foto-foto Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian 2023

Lampiran 2.Laporan Pertanggungjawaban penerimaan (SPJ Pendapatan)
Tahun 2023

Lampiran 3.Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran
2023

Lampiran 4.Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3 1 Indikator Kinerja Sasaran

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
					2023		
1	Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan peternakan (ton) (Tanaman pangan, hortikultura, susu, telur, dan daging)	Produktivitas komoditas pertanian dan peternakan (ton) (Tanaman pangan, hortikultura, susu, telur, dan daging)	Jumlah produksi jagung	Ton	64	22	34%
			Jumlah produksi nanas	Ton	2.400	1603,9	67%
			Jumlah produksi jahe merah	Ton	3	4,62	154%
			Jumlah produksi cabe	Ton	21	21,73	103%
			Jumlah produksi daging	Ton	5.438	5.023	92%
			Jumlah produksi telur	Ton	141,69	30	21%
			Jumlah produksi susu	Liter	136.631	66.346	49%
			Jumlah populasi ternak	Ekor	79.270	76.447	96%
			Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Ekor	1.900	2000	105%
2	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (Kg) x 1000/Jumlah Penduduk	ton/kpt/tahun	97.000	130.275	134%

Foto-foto Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian 2023







lomba cipta menu Dan KWT berprestasi KWT MAWAR
-2°8'44", 106°5'59", 17,5m
01/11/2023



Lomba B2SA dan KWT Berprestasi (KWT Ceria)
-2°6'46", 106°4'58", 44,5m, 349"
01/11/2023 14:10:32

